

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir, *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004).
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Badrulzaman, Mariam Barus. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015).
- Barnini, Dkk *“Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar pada Putusan Perdamaian PKPU dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit”*.
- Bernard Nainggolan, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2014.
- Bernard Nainggolan, *Transparansi Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung:PT Alumni, 2015.
- B. Huizink, *Insolventie*, Penerjemah Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta:2004).
- Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Dean G Pruitt &Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum kepailitan Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar grafika, 2018).
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)

- Ivida Dewi Amri Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, Yogyakarta: Lakbang Presindo, 2021
- J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- Jhonny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge MA: Seventh Printing, (The Belknap Press of Harvard University Press, 1976).
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kartini Mulyadi, 2001, “*Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*” dalam Rudhy A. Lontoh (ed), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Kartini Muljadi, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2001).
- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978).
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994).
- M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan. 1 (Alumnus, 2006).
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: P.T Alumni, 2010).
- Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016).

- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: GHlmlia Indonesia, 2007).
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Noeng Muhadjir, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996).
- Pande Radja Silalahi, *Dampak Perpu Kepailitan terhadap Dunia Usaha dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015).
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004).
- Rudy A. Lontoh, Dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005)
- Suharsimi Arikunto, “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2012)
- The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

2. Penelitian/Jurnal

- Annisa, Feiby dan Mia Hadiati. “Analisis Pengesahan Perdamaian (Homologasi) terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Isi Perjanjian Perdamaian yang Mengalami Perubahan (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 718K/Pdt.Sus-Pailit/2019)”. *Jurnal Hukum Adigama*, 4, 1 (2021): 73-96. DOI: 10.24912/adigama.v4i1.10841.
- Anita Afriana dan Rai Mantili, *Implementasi Perdamaian (Accord) Pada Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia*, Tahun 2017, *Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Adam Barnini, Dkk, *Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit*, 2021, *Jurnal Hukum*.
- Fransiskus Walten, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Penanggung Hak Tangguhan Yang Belum Didaftarkan Dalam Kepailitan*, 2015, Tesis Magister Hukum UII Jogjakarta, Hlm. 82.
- Pan. Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 6 Nomor 1. 2009.
- Rado Fridsel Leonardusa & Novitasari, *Kedudukan Hukum Kreditor Yang Tidak Terverifikasi Dalam Undang Undang Kepailitan*, Tahun 2020, *Jurnal Hukum*.

Siti Anisah, “*Studi Komparasi terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan*”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16, edisi khusus (2009): Hlm. 30-50.

Tedy Herlambang, Dkk, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Perjanjian Yang Telah Disahkan (Homologasi)*, Tahun 2017, Jurnal Nuansa Kenotariatan.

Wisnu Ardytia, *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Kasus Terhadap Peninjauan Kembali Reg. No. 07 PK/N/2004)*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Tahun 2009.

3. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan: Rumusan Pleno Kamar Perdata.

4. Website

Ilhamendra, *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory Of Justice*, <https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/>

diakses tanggal 28 Oktober 2022.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 22 November 2022.

